

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dimulai saat terjadi perubahan kebijakan yang sebelumnya bersifat sentralistik menjadi desentralistik yang merupakan bentuk pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara otonom di mana pemerintah daerah diberi wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tingkat daerah berdasarkan kriteria yang ditetapkan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Perubahan ini ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang kemudian masing-masing direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, sedangkan pengelolaan keuangan daerah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan ke daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Majene pada tahun 2006 berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD. Dan sejak tahun 2007 telah menggunakan perubahan regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Beberapa peraturan ini telah diimplementasikan mulai pada tahap perencanaan dan penganggaran hingga pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Dalam kurun waktu tahun 2006 sampai 2011, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah masih banyak bergantung pada penerimaan dari dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, namun demikian berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Oleh karena itu untuk mendukung optimalisasi pendapatan daerah tersebut telah dilakukan upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dengan berbagai kegiatan di

lapangan yang dimulai dengan pendataan ulang terhadap sumber-sumber Pendapatan Daerah, melaksanakan Uji Petik terhadap pengelolaan pajak dan retribusi, serta evaluasi terhadap Pengelolaan Pajak dan Retribusi yang menitik beratkan perhatian terhadap pungutan yang dilakukan oleh petugas Pajak dan Retribusi yang ada di lapangan.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

a. Pendapatan

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Perkembangan realisasi pendapatan di Kabupaten Majene pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 cenderung mengalami peningkatan baik itu dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada tahun 2006 jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp. 252.313.963.959,17, tahun 2007 sebesar Rp. 295.745.903.397,74, tahun 2008 sebesar Rp. 324.710.776.228,97, tahun 2009 sebesar Rp. 343.287.915.815,13 dan pada tahun sebesar 2010 sebesar Rp. 397.942.973.871,70, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,16%.

Untuk bagian pendapatan asli daerah rata-rata pertumbuhan pada tahun 2006 - 2010 sebesar 9,11%. Penerimaan pendapatan asli daerah terbesar terjadi pada tahun 2009, hal ini disebabkan adanya kenaikan realisasi dibandingkan dengan tahun 2008 dari seluruh komponen pendapatan asli daerah yang terdiri dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Namun pada tahun 2010 realisasi pendapatan asli daerah menurun karena tidak tercapainya target pendapatan dari komponen pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana perimbangan setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sejak tahun 2006 - 2010 sebesar 7,19%. Penerimaan terbesar dari dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak dan dana alokasi umum terjadi pada tahun 2010, sedangkan penerimaan terbesar dari dana alokasi khusus terjadi pada tahun 2009.

Pertumbuhan rata-rata untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2006 - 2010 adalah sebesar 247,03%. Persentase pertumbuhan ini sangat tinggi karena kenaikan realisasi jenis pendapatan ini pada tahun 2007 sebesar 510,13% dan pada tahun 2010 sebesar 440,16%. Penerimaan

terbesar lain-lain pendapatan daerah yang sah terjadi pada tahun 2010 karena adanya kenaikan yang cukup tinggi dari penerimaan dana penyesuaian dan otonomi khusus serta dana hibah.

Secara lengkap perincian mengenai alokasi realisasi penerimaan pendapatan periode tahun 2006 - 2010 disajikan dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2006 s/d Tahun 2010
Kabupaten Majene**

No	Uraian	Tahun 2006 (Rp.)	Tahun 2007 (Rp.)	Tahun 2008 (Rp.)	Tahun 2009 (Rp.)	Tahun 2010 (Rp.)	Rata-rata pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	252.313.963.959,17	295.745.903.397,74	324.710.776.228,97	343.287.915.815,13	397.942.973.871,70	12,16
1.1	Pendapatan Asli Daerah	5.208.504.330,17	6.312.279.831,51	6.884.131.279,97	8.464.980.007,13	7.044.224.353,70	9,11
1.1.1	Pajak daerah	884.301.568,00	1.032.431.700,00	1.014.615.635,00	1.281.371.401,00	1.374.367.175,00	12,14
1.1.2	Retribusi daerah	1.973.020.314,00	1.514.394.145,68	1.618.589.271,00	2.241.747.102,00	2.244.790.821,00	5,57
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	237.249.258,39	377.312.048,67	731.934.053,60	817.791.248,39	901.365.155,07	43,74
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	2.113.933.189,78	3.388.141.937,16	3.518.992.320,37	4.124.070.255,74	2.523.701.202,63	10,63
1.2	Dana Perimbangan	245.625.398.997,00	280.403.328.911,00	308.201.802.950,00	322.190.115.030,00	322.661.853.116,00	7,19
1.2.1	Dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak	23.255.973.997,00	24.921.328.911,00	24.271.545.950,00	24.251.472.030,00	30.694.192.116,00	7,76

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Majene Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	Tahun 2006 (Rp.)	Tahun 2007 (Rp.)	Tahun 2008 (Rp.)	Tahun 2009 (Rp.)	Tahun 2010 (Rp.)	Rata-rata pertumbuhan (%)
1.2.2	Dana alokasi umum	197.010.000.000,00	221.772.000.000,00	243.588.257.000,00	252.249.643.000,00	262.008.961.000,00	7,46
1.2.3	Dana alokasi khusus	25.359.425.000,00	33.710.000.000,00	40.342.000.000,00	45.689.000.000,00	29.958.700.000,00	7,86
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.480.060.632,00	9.030.294.655,23	9.624.841.999,00	12.632.820.778,00	68.236.896.402,00	247,03
1.3.1	Hibah		8.061.843.500,00	6.524.096.602,00	-	3.262.650.000,00	(4,77)
1.3.2	Dana darurat						
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya ***)	1.479.999.032,00	968.451.155,23	3.100.745.397,00	3.097.504.778,00	4.104.554.071,00	54,50
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	61.600,00	-	-	9.535.316.000,00	60.869.692.331,00	134,59
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya						

b. Belanja

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah dan dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja daerah disusun berdasarkan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dikeluarkan secara adil dan merata, agar relatif dapat dinikmati oleh masyarakat, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Belanja Daerah tahun 2006 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2003, dimana belanja daerah dibagi atas :

- 1) Belanja Pelayanan Publik, meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, perjalanan dinas, pemeliharaan, modal, bagi hasil dan bantuan keuangan serta belanja tidak terduga
- 2) Belanja Aparatur Daerah meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, perjalanan dinas, pemeliharaan dan belanja modal

Belanja daerah sejak tahun 2007 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dimana belanja daerah dibagi menurut kelompok belanja yang terdiri dari :

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Majene Tahun 2012 - 2016

- 1) Belanja tidak langsung, yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
- 2) Belanja langsung, yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan arah peningkatan proporsi belanja publik yang didukung oleh efektivitas dan efisiensi belanja aparatur, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.

Secara lengkap perincian mengenai alokasi realisasi belanja periode tahun 2006 - 2010 disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2006

No	Uraian	Tahun 2006 (Rp.)
1	BELANJA	238.210.994.058,13
1.1	Belanja Aparatur Daerah	71.411.534.797,00
1.1.1	Belanja Pegawai	39.012.011.384,00
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.119.344.379,00
1.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	8.343.273.650,00
1.1.4	Belanja Pemeliharaan	3.723.958.901,00
1.1.5	Belanja Modal	12.212.946.483,00

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Majene Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	Tahun 2006 (Rp.)
1.2	Belanja Pelayanan Publik	166.799.459.261,13
1.2.1	Belanja Pegawai	62.123.559.441,13
1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.817.005.007,00
1.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	960.091.500,00
1.2.4	Belanja Pemeliharaan	1.970.101.400,00
1.2.5	Belanja Modal	62.075.345.768,00
1.2.6	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	16.693.246.027,00
1.2.7	Belanja Tak Terduga	5.160.110.118,00

**Tabel 3.3 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Tahun 2006 s/d Tahun 2010
Kabupaten Majene**

No	Uraian	Tahun 2006 (Rp.)	Tahun 2007 (Rp.)	Tahun 2008 (Rp.)	Tahun 2009 (Rp.)	Tahun 2010 (Rp.)	Rata-rata pertumbuhan (%)
1	BELANJA	238.210.994.058,13	290.419.573.768,76	342.079.278.413,69	349.700.476.060,87	410.051.105.450,15	14,80
1.1	Belanja Tidak Langsung		124.606.029.473,00	170.978.882.464,05	191.659.413.968,87	231.694.362.295,15	23,40
1.1.1	Belanja Pegawai		108.259.062.223,00	147.882.726.318,05	171.371.090.770,00	208.740.765.531,00	24,76
1.1.2	Belanja Subsidi		50.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00	(33,33)
1.1.3	Hibah		16.940.000,00		1.594.000.000,00	3.304.500.000,00	35,77
1.1.4	Belanja Bantuan Sosial		9.965.270.250,00	8.905.034.250,00	4.886.449.600,00	3.837.959.217,03	(25,74)
1.1.4	Belanja Bantuan Sosial		9.965.270.250,00	8.905.034.250,00	4.886.449.600,00	3.837.959.217,03	(25,74)
1.1.5	Belanja Bagi Hasil				284.251.435,92	370.337.523,79	
1.1.6	Belanja Tak Terduga		1.387.256.500,00	995.755.000,00	1.157.836.210,00	1.279.750.000,00	(0,47)
1.2	Belanja Langsung		165.813.544.295,76	171.100.395.949,64	158.041.062.092,00	178.356.743.155,00	2,80
1.2.1	Belanja Pegawai		28.819.612.670,00	28.471.909.926,00	19.479.225.025,00	17.195.669.868,00	(14,84)
1.2.2	Belanja Barang dan Jasa		43.522.928.630,25	46.451.534.005,50	55.456.835.135,00	60.966.832.012,00	12,02
1.2.3	Belanja Modal		93.471.002.995,51	96.176.952.018,14	83.105.001.932,00	100.194.241.275,00	3,29
							-

Dari tabel di atas realisasi belanja Kabupaten Majene kurun waktu tahun 2006-2010 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 14,80% dimana realisasi pada tahun 2006 sebesar Rp. 238.210.994.058,13, tahun 2007 naik 21,92% menjadi sebesar Rp. 290.419.573.768,76, dan tahun 2008 naik 17,79% menjadi sebesar Rp. 342.079.278.413,69. Pada tahun 2009 pertumbuhan realisasi belanja hanya 2,23% dengan jumlah realisasi belanja sebesar Rp. 349.700.476.060,87 dan realisasi belanja pada tahun 2010 sebesar Rp. 410.051.135.450,15 atau naik 17,26%.

c. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Tahun 2006 – 2010 rata-rata pertumbuhan penerimaan daerah sebesar 3,71% sedangkan pengeluaran daerah minus 33,74%. Secara lengkap perincian mengenai alokasi realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan periode tahun 2006 - 2010 disajikan dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.4 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan
Tahun 2006 s/d Tahun 2010
Kabupaten Majene**

No	Uraian	Tahun 2006 (Rp.)	Tahun 2007 (Rp.)	Tahun 2008 (Rp.)	Tahun 2009 (Rp.)	Tahun 2010 (Rp.)	Rata-rata pertumbuhan (%)
1	Penerimaan Daerah	13.984.796.157,49	28.955.091.270,30	33.728.224.127,27	13.451.141.960,11	6.918.707.220,71	3,71
1.1	Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu	13.149.673.781,49	25.087.766.058,53	30.043.790.374,27	11.854.778.237,55	6.163.209.870,37	
1.2	Penerimaan Kembali pemberian pinjaman	442.482.515,00	1.358.960.659,00	2.088.176.975,00	1.596.363.722,56	755.497.350,34	
1.3	Penerimaan Piutang Daerah		314.314.552,77	1.596.256.778,00			
1.4	Penerimaan pinjaman dan Obligasi	-	2.194.050.000,00				
1.5	Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan	392.639.861,00					
2	Pengeluaran daerah	28.087.766.058,53	4.168.278.686,00	4.500.000.000,00	760.000.000,00	952.800.000,00	(33,74)
2.1	Penyertaan Modal	500.000.000,00	1.000.000.000,00	500.000.000,00	750.000.000,00	500.000.000,00	
2.2	Pemberian pinjaman Daerah		-	1.900.000.000,00	10.000.000,00		
2.3	Pembayaran Utang pokok pinjaman lainnya		3.168.278.686,00	2.100.000.000,00		452.800.000,00	
2.4	Sisa lebih perhitungan tahun berjalan	25.087.766.058,53					
2.5	Peminjaman Modal	2.500.000.000,00					
							-

3.1.2. Neraca Daerah

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban yang salah satunya berupa laporan neraca yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Pertumbuhan aset daerah di Kabupaten Majene setiap tahunnya terus meningkat, dengan rata-rata pertumbuhan pada tahun 2006 - 2011 sebesar 31,40%, dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Aset lancar yang terdiri dari kas, piutang dan persediaan rata-rata pertumbuhannya minus 30,50%. Hal ini terjadi karena pada bagian kas dan piutang setiap tahunnya mengalami penurunan dan pada persediaan meskipun mengalami penurunan pada tahun 2009 namun rata-rata pertumbuhannya sebesar 176,37%
- 2) Investasi jangka panjang yang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 17,03%
- 3) Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah daerah dan karenanya signifikan dalam penyajian rencana. Klasifikasi aset tetap yang digunakan terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,

irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya dan Konstruksi dalam pengerjaan. Rata-rata pertumbuhan aset tetap sebesar 33,78%

- 4) Aset lainnya terdiri dari tagihan penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah. Rata-rata pertumbuhan aset lain-lain sebesar 115,83%

Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Dalam neraca daerah Kabupaten Majene hanya memiliki kewajiban jangka pendek dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 372,84%. Kewajiban jangka pendek ini terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga, utang pajak dan utang jangka pendek lainnya

Untuk ekuitas dana yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah rata-rata pertumbuhannya sebesar 31,03%. Ekuitas dana meliputi ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan

Secara lengkap gambaran pertumbuhan neraca daerah pada tahun 2006 - 2010 disajikan pada tabel berikut :

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Majene Tahun 2012 - 2016

**Tabel 3.5 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Majene**

No.	Uraian	Tahun 2006 (Rp.)	Tahun 2007 (Rp.)	Tahun 2008 (Rp.)	Tahun 2009 (Rp.)	Tahun 2010 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	ASET						
1.1.	ASET LANCAR	30.445.657.853,30	35.108.026.597,23	16.617.701.527,46	9.569.500.481,35	5.528.813.939,74	(30,50)
1.1.1.	Kas	25.087.766.058,53	30.374.130.495,28	12.418.784.777,55	6.278.581.714,37	2.490.952.965,26	(36,95)
1.1.2.	Piutang	5.167.104.093,77	3.987.129.774,95	3.224.580.068,91	2.935.349.649,98	1.092.555.716,48	(28,43)
1.1.3.	Persediaan	190.787.701,00	746.766.327,00	974.336.681,00	355.569.117,00	1.945.305.258,00	176,37
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG	4.824.259.618,00	7.475.096.305,28	8.003.184.944,28	8.356.834.044,28	8.497.451.474,85	17,03
1.2.1.	Investasi Non Permanen	4.824.259.618,00	3.880.324.646,00	3.677.215.671,00	3.280.864.771,00	3.231.979.771,00	(9,27)
1.2.2.	Investasi Permanen		3.594.771.659,28	4.325.969.273,28	5.075.969.273,28	5.265.471.703,85	35,35
1.3.	ASET TETAP	289.339.173.650,00	504.296.097.376,51	600.508.049.394,65	683.963.231.326,00	874.485.186.774,00	33,78
1.3.1.	Tanah	10.852.228.880,00	55.797.484.909,00	58.031.581.909,00	60.384.551.909,00	153.791.558.000,00	144,23
1.3.2.	Peralatan dan mesin	55.470.768.387,00	76.066.143.942,00	87.679.928.642,00	105.713.984.122,00	129.215.694.255,00	23,80
1.3.3.	Gedung dan bangunan	80.131.240.803,00	188.886.136.330,00	229.749.588.368,00	268.309.711.822,00	310.952.960.497,00	47,51
1.3.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	137.604.863.070,00	123.482.046.817,51	161.847.213.990,65	190.370.786.173,00	277.064.206.522,00	20,99
1.3.5.	Aset tetap lainnya	5.280.072.510,00	57.565.939.800,00	58.517.760.300,00	59.184.197.300,00	2.364.755.000,00	224,26
1.3.6.	Konstruksi dalam pengerjaan		2.498.345.578,00	4.681.976.185,00		1.096.012.500,00	46,85
1.4.	ASET LAINNYA	-	13.813.073.143,90	1.833.348.416,10	7.005.138.790,23	18.770.859.213,98	115,83
1.4.1.	Tagihan penjualan angsuran		1.351.105.372,05	1.195.317.818,09	619.290.295,46	148.242.477,62	(8,95)
1.4.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah		12.461.967.771,85				
1.4.3.	Aset lain-lain			638.030.598,01	6.385.848.494,77	18.622.616.736,36	298,12

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Majene Tahun 2012 - 2016

No.	Uraian	Tahun 2006 (Rp.)	Tahun 2007 (Rp.)	Tahun 2008 (Rp.)	Tahun 2009 (Rp.)	Tahun 2010 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	JUMLAH ASET DAERAH	324.609.091.121,30	560.692.293.422,92	626.962.284.282,49	708.894.704.641,86	907.282.311.402,57	31,40
2.	KEWAJIBAN	-	2.455.038.282,00	594.062.835,00	547.685.198,00	8.625.943.663,00	372,84
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	2.455.038.282,00	594.062.835,00	547.685.198,00	8.625.943.663,00	372,84
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga		94.050.000,00		452.800.000,00	8.223.573.004,00	454,04
2.1.2.	Utang Jangka Pendek Lainnya - Utang Pajak		260.988.282,00	559.062.835,00	94.885.198,00	402.370.659,00	113,81
2.1.3.	Utang Jangka Pendek Lainnya		2.100.000.000,00	35.000.000,00			(24,58)
3.	EKUITAS DANA	324.609.091.121,30	558.237.255.140,92	626.368.221.447,49	708.347.019.443,86	898.656.367.739,57	31,03
3.1.	EKUITAS DANA LANCAR	29.079.984.178,30	32.719.032.665,23	16.023.638.692,46	9.021.815.283,35	(3.097.129.723,26)	(54,13)
3.1.1.	SILPA	25.087.766.058,53	30.113.142.213,28	11.859.721.942,55	6.278.581.714,37	(6.142.254.357,74)	(71,37)
3.1.2.	Cadangan piutang	3.801.430.418,77	4.053.174.124,95	3.224.580.068,91	2.935.349.649,98	1.092.555.716,48	(21,39)
3.1.3.	Cadangan persediaan	190.787.701,00	746.766.327,00	974.336.681,00	355.569.117,00	1.945.305.258,00	176,37
3.1.4.	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		(2.194.050.000,00)	(35.000.000,00)	(547.685.198,00)		(415,80)
3.1.5.	Pendapatan Yang ditangguhkan					7.263.660,00	
3.2.	EKUITAS DANA INVESTASI	295.529.106.943,00	525.518.222.475,69	610.344.582.755,03	699.325.204.160,51	901.753.497.462,83	34,37
3.2.1.	Diinvestasikan dalam aset tetap	289.339.173.650,00	504.296.097.376,51	600.508.049.394,65	683.963.231.326,00	874.485.186.774,00	33,78
3.2.2.	Diinvestasikan dalam aset lainnya	1.365.673.675,00	13.747.028.793,90	1.833.348.416,10	7.005.138.790,23	18.770.859.213,98	317,50
3.2.3.	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	4.824.259.618,00	7.475.096.305,28	8.003.184.944,28	8.356.834.044,28	8.497.451.474,85	17,03
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	324.609.091.121,30	560.692.293.422,92	626.962.284.282,49	708.894.704.641,86	907.282.311.402,57	31,40

3.1.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan secara umum diarahkan pada peningkatan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi melalui perencanaan pemanfaatan dana secara tepat kegiatan dan tepat biaya, yang terutama ditujukan untuk program-program yang terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan pengembangan infrastruktur dasar guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai hal tersebut di atas pengelolaan pendapatan dilakukan dengan upaya-upaya penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

Sementara itu pengelolaan belanja diarahkan pada upaya-upaya optimalisasi pemanfaatan anggaran belanja daerah pada program-program yang memiliki dampak besar terhadap pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Disamping itu, kebijakan pengelolaan belanja daerah juga diarahkan pada penyelarasan sasaran program dan kegiatan sesuai dengan urusan dan kewenangan terkait dengan dekonsentrasi, tugas perbantuan, dan desentralisasi.

3.1.4. Proporsi Penggunaan Anggaran

Selama kurun waktu tahun 2008 - 2010 proporsi penggunaan anggaran di Kabupaten Majene sebagian besar terserap untuk memenuhi kebutuhan aparatur seperti belanja gaji dan tunjangan, belanja tambahan penghasilan, belanja makanan dan minuman pegawai, belanja penerimaan anggota & pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH, belanja pemungutan pajak daerah, belanja honorarium, belanja uang lembur, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi & bimbingan teknis PNS, belanja beasiswa / pendidikan PNS, belanja pakaian dinas, belanja perjalanan dinas dan belanja modal terkait dengan kebutuhan aparatur.

Berikut realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada tahun 2008 - 2010 :

Tabel 3.6 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Majene

No.	Uraian	Tahun 2008 (Rp)	Tahun 2009 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
A	Belanja Tidak Langsung			
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	140.497.977.729	165.268.977.133	181.791.672.131
2	Belanja Tambahan Penghasilan	768.065.000	5.879.950.133	18.871.452.090
3	Belanja Makanan & Minuman Pegawai	4.378.230.250	4.816.530.133	4.509.055.000
4	Belanja Penerimaan Anggota & Pimpinan DPRD Serta Operasional KDH/WKDH	871.840.781	752.700.000	2.151.286.870
5	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	532.658.846	1.281.371.401	637.299.440
B	Belanja Langsung			
1	Belanja Honorarium PNS	958.329.081	2.049.731.310	1.124.083.958

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Majene Tahun 2012 - 2016

No.	Uraian	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
2	Belanja Uang Lembur	278.063.600	489.951.800	534.292.000
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.303.635.000	1.068.465.000	1.456.144.999
4	Belanja Kursus , Pelatihan, Sosialisasi & Bimbingan Teknis PNS	3.103.614.700	3.079.980.500	1.662.812.500
5	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	259.641.000	295.333.800	221.142.000
6	Belanja Pakaian Khusus & Hari- hari Tertentu	90.229.000	69.300.000	97.125.000
7	Belanja Perjalanan Dinas	8.662.336.083	11.769.597.684	10.021.340.500
8	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, Peralatan & Perlengkapan dll)	9.144.765.299	14.292.293.899	7.013.396.500
TOTAL		170.849.386.369	211.114.182.793	230.091.102.988

Dari data di atas bila dibandingkan dengan total realiasi belanja ditambah dengan pengeluaran pembiayaan, maka realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur pada tahun 2008 adalah sebesar 49,30%, tahun 2009 sebesar 60,24% dan tahun 2010 sebesar 55,98%. Lebih jelasnya proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Majene

No.	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2008	170.849.386.369	346.579.278.413,69	49,30%
2	Tahun Anggaran 2009	211.114.182.793	350.460.476.060,87	60,24%
3	Tahun Anggaran 2010	230.091.102.988	411.003.905.450,15	55,98%

3.1.5. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan di Kabupaten Majene kurun waktu tahun 2008 - 2010 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Realisasi pendapatan daerah setiap tahunnya meningkat dengan realisasi terbesar pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 397.942.973.871,70
- 2) Realisasi belanja daerah juga meningkat setiap tahun dengan realisasi terbesar pada tahun 2010 sebesar Rp. 410.051.135.450,15
- 3) Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah terbesar terjadi pada tahun 2008 dengan nilai sebesar Rp. 4.500.000.000,00

Berikut secara lengkap data realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pengeluaran pembiayaan yang menunjukkan defisit rill anggaran:

Tabel 3.8 Defisit Rill Anggaran Kabupaten Majene

No	Uraian	Tahun 2008 (Rp)	Tahun 2009 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	324.710.776.228,97	343.287.915.815,13	397.942.973.871,70
	Dikurangi Realisasi			
2	Belanja daerah	342.079.278.413,69	349.700.476.060,87	410.051.135.450,15
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4.500.000.000,00	760.000.000,00	952.800.000,00
	Defisit rill	(21.868.502.184,72)	(7.172.560.245,74)	(13.060.961.578,45)

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2008 defisit rill sebesar Rp. 21.868.502.184,72, tahun 2009 menurun menjadi sebesar Rp. 7.172.560.245,74 dan meningkat kembali pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp. 13.060.961.578,45. Defiist rill anggaran ini ditutup dengan realisasi penerimaan pembiayaan dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 3.9 Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Majene

No	Uraian	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	30.043.790.374,27	11.854.778.237,55	6.163.209.870,37
3	Penerimaan Kembali pemberian pinjaman daerah	2.088.176.975,00	1.596.363.722,56	755.497.350,34
4	Penerimaan piutang daerah	1.596.256.778,00		
	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	33.728.224.127,27	13.451.141.960,11	6.918.707.220,71

3.2. Kerangka Pendanaan

3.2.1. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif,

transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang kerangka pendanaan yang bertujuan untuk menggambarkan kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah yang meliputi kebijakan pendapatan dan belanja selama lima tahun ke depan.

Kebijakan Pendapatan Daerah untuk APBD kurun waktu 2012-2016 diarahkan pada upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah yang meliputi ; Pendapatan Asli Daerah yang akan ditingkatkan melalui optimalisasi pengelolaan potensi pajak dan retribusi daerah dan optimalisasi pengelolaan investasi dan barang milik daerah. Hal ini dilakukan dengan pembenahan manajemen data penerimaan PAD, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap peraturan daerah dan retribusi yang perlu disesuaikan dan menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi yang ada. Sedangkan untuk pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan upaya peningkatannya akan dilakukan melalui peningkatan akurasi data sumberdaya alam sebagai dasar perhitungan pembagian Dana perimbangan. serta meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Propinsi dalam pelaksanaan dana perimbangan. Sementara itu untuk meningkatkan pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah akan dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi terkait dengan Dana Bagi Hasil dan meningkatkan koordinasi dengan Instansi yang lebih tinggi dan Instansi terkait lainnya.

Untuk kebijakan pengelolaan belanja daerah selama kurun waktu 2012- 2016 tetap berpedoman pada prinsip – prinsip penganggaran yang disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan beban kerja dan prestasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.

Dengan menggunakan analisis regresi sederhana yang menggunakan data lima tahun terakhir maka diperoleh gambaran tentang kapasitas riil keuangan daerah sebagai berikut :

**Tabel 3.10 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Majene**

No.	Uraian	Proyeksi				
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
		2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
1	Pendapatan	500.018.106.368	565.012.415.232	606.775.422.715	648.538.430.199	690.301.437.682
2	Pencairan dana cadangan (sesuai perda)	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	-	-	-	-	-
	Total Penerimaan	500.018.106.368	565.012.415.232	606.775.422.715	648.538.430.199	690.301.437.682
	Dikurangi :					
4	Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	242.226.259.174	264.603.597.570	286.980.935.967	309.358.274.363	331.735.612.760
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	257.791.847.194	300.408.817.662	319.794.486.748	339.180.155.835	358.565.824.922

Tabel 3.11 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Majene

No.	Uraian	Proyeksi				
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
		2012	2013	2014	2015	2016
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
I	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	257.791.847.194	300.408.817.662	319.794.486.748	339.180.155.835	358.565.824.922
	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I					
II.a	Belanja Langsung	180.050.587.874	183.678.761.476	187.306.935.079	190.935.108.682	194.563.282.284
II.b	Pembentukan Dana Cadangan					
	Dikurangi :					
II.c	Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	4.254.973.816	4.406.822.080	4.558.670.344	4.710.518.608	4.862.366.872
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	-	-	-	-	-
II	Total Rencana Pengeluaran Prioritas I	175.795.614.058	179.271.939.397	182.748.264.735	186.224.590.074	189.700.915.413
	(II.a+II.b-II.c-II.d)					
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	81.996.233.136	121.136.878.265	137.046.222.013	152.955.565.761	168.864.909.510

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Majene Tahun 2012 - 2016

No.	Uraian	Proyeksi				
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
		2012	2013	2014	2015	2016
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II					
III.a	Belanja Tidak Langsung	289.184.105.989	319.541.845.905	349.899.585.820	380.257.325.736	410.615.065.652
	Dikurangi :					
III.b	Belanja Tidak Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	237.971.285.358	260.196.775.491	282.422.265.623	304.647.755.756	326.873.245.888
III	Total Rencana Pengeluaran Prioritas II	51.212.820.631	59.345.070.414	67.477.320.197	75.609.569.980	83.741.819.764
	(III.a-III.b)					
	Surplus Anggaran Riil atau Berimbang (I-II-III)	30.783.412.505	61.791.807.851	69.568.901.816	77.345.995.781	85.123.089.746